



RENJA PERUBAHAN 2024

BIRO ORGANISASI

DAFTAR ISI

	Hal
	i
Bab I	1
Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II	7
Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Triwulan II	7
Bab III	17
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	17
3.1 Tujuan dan Sasaran	17
3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024	20
3.3 Kerangka Kerja dan pendanaan pada Rancangan Perubahan Renja	22
Bab IV	25
Penutup	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja dapat dilakukan perubahan. Sebagaimana tertulis pada Pasal 343 ayat (1) bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan yang meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya pada Pasal 360 ayat (2) disebutkan Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pada ayat (3) disebutkan Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 050/105/V/P2EPD/Bappeda-2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, melakukan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024 yang pada akhirnya nanti digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Perubahan Renja Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
 - 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
- 14) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 15) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- 16) Surat Edaran Gubernur Nomor: 050/150/V/P2EPD/Bappeda-2024 tentang Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud Rancangan Perubahan Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah memberikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan triwulan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian

dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- 2) Menyediakan acuan bagi Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2024 secara terpadu, terarah dan terukur;
- 3) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Sumatera Barat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan perubahan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;

BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Memuat penjelasan tentang pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024;

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang mengalami perubahan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024;

BAB IV Penutup

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja dan rencana tindak lanjutnya.

B A B II

EVALUASI RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Hasil evaluasi Renja Perubahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Nama OPD : BIRO ORGANISASI

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALANAN (TAHUN 2024) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN
1	2					3	5	6	7	8	9	10
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	1.349.018.427	50%	700.002.189	50,00	51,89
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	6.124.500	50%	6.124.200	50,00	100,00
4 01 01 1 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	4.279.500	2 Dokumen	4.279.200	100,00	99,99			
4 01 01 1 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.017.000	3 Laporan	1.017.000	300,00	100,00			
4 01 01 1 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	828.000	1 Laporan	828.000	100,00	100,00			
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	93.360.000	50%	46.680.000	50,00	50,00
4 01 01 1.02 03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	93.360.000	1 Dokumen	46.680.000	100,00	50,00			
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	11.143.000	50%	7.860.216	50,00	70,54
4 01 01 1.03 02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	7.860.216	100,00	98,25			
4 01 01 1.03 06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.143.000	1 Laporan	0	100,00	0,00			
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	5.000.000	0%	1.600.000	0,00	32,00
4 01 01 1.05 09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Orang	5.000.000	3 Orang	1.600.000	100,00	32,00			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALANAN (TAHUN 2024) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	966.768.600	50%	580.130.684	50,00	60,01
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	76.044.300	5 Paket	54.900.000	100,00	72,19
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	10 Paket	88.330.000	10 Paket	74.110.000	100,00	83,90
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	45.948.300	4 Paket	21.407.800	66,67	46,59
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	31.170.000	1 Paket	17.490.000	100,00	56,11
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	725.276.000	55 Laporan	412.222.884	55,00	56,84
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	104.957.234	0	0	0,00	0,00
4 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	18 Paket	86.258.334	0 Paket	0	0,00	0,00
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	18.698.900	0 Unit	0	0,00	0,00
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	81.675.093	50%	39.064.089	50,00	47,83
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	81.675.093	0 Laporan	39.064.089	0,00	47,83
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100%	79.990.000	50%	18.543.000	50,00	23,18
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	62.290.000	4 Unit	14.328.000	100,00	23,00
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	48 Unit	17.700.000	10 Unit	4.215.000	20,83	23,81
4 01 02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	12 Perangkat Daerah	1.650.981.573	18 Perangkat Daerah	434.126.408	150,00	26,30

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALANAN (TAHUN 2024) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024		
			TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	
		Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik	11 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah		0,00		
		Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	18 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah		0,00		
		Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat	100%		100%		100,00		
		Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%		0%		0,00		
		Penataan Jabatan Perangkat Daerah	100%		0%		0,00		
4	01 02 1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Kabupaten / Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	530.175.039	100%	120.182.699	100,00	22,67
			Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%		0%		0,00	
4	01 02 1.01 01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab/Kota	1 Dokumen	130.760.700	Dokumen	43.542.841	0,00	33,30
4	01 02 1.01 02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab/Kota	1 Dokumen	232.236.139	Dokumen	40.148.758	0,00	17,29
4	01 02 1.01 03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan,	1 Dokumen	167.178.200	Dokumen	36.491.100	0,00	21,83
4	01 02 1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Kompenen Pemenuhan untuk 4 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (Area Manajemen Perubahan, Penguataan Akuntabilitas, Penataan Tatalaksana, dan Pelayanan Publik)	5 Skor	1.120.806.534		313.943.709		28,01
4	01 02 1.02 01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	213.771.600	Dokumen	104.180.451	0,00	48,73
4	01 02 1.02 02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	193.811.800	Dokumen	89.377.805	0,00	46,12
4	01 02 1.02 03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	90.416.800	Laporan	5.626.000	0,00	6,22
4	01 02 1.02 04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	1 Dokumen	179.260.251	Dokumen	34.761.757	0,00	19,39

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALANAN (TAHUN 2024) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN
4	01	02	1.02	05		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	443.546.083	Dokumen	79.997.696	0,00	18,04

Berdasarkan tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi serapan anggaran baru mencapai 37,80%. Hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Adanya pergeseran jadwal kegiatan dikarenakan mandatory kegiatan dari Kementerian.
2. Adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat di laksanakan karena rasionalisasi anggaran.
3. Terjadi pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan alokasi dana pada beberapa kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahunan Rencana Strategis Biro Organisasi, tahun 2024 Biro Organisasi memiliki 2 (dua) program 10 (sepuluh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan. Capaian Kinerja Program Tahun 2024 sampai triwulan II dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Program/Kegiatan/Subkegiatan yang belum memenuhi target yang ditetapkan sampai pada Triwulan II Tahun 2024.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada Program ini ada 6 sub kegiatan dari 3 kegiatan yang realisasinya belum terpenuhi sampai pada triwulan ii.

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

indikator dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan target 6 Paket dan sudah terealisasi sebanyak 4 paket, dan untuk 2 paket yang tersisa terletak pada triwulan III dan IV, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 45.948.300,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 21.407.800,- dengan persentase Kinerja 66,67% dan untuk realisasi Keuangan 46,59%.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 100 laporan dan pada triwulan ii ini sudah terealisasi sebanyak 55 Laporan, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 725.276.000,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 412.222.884,- dengan persentase Kinerja 55% dan untuk realisasi Keuangan 56,84%.

- a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub kegiatan Pengadaan Mebel

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket yang disediakan dengan target 18 paket, belum terpenuhinya target dari pelaksanaan subkegiatan ini disebabkan karena pengadaannya terletak pada triwulan III, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 86.258.335,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan persentase Kinerja 0% dan untuk realisasi Keuangan 0%.

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator dari subkegiatan ini adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan dengan target 1 paket dan belum terealisasi disebabkan karena pengadaannya terletak pada triwulan III, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 18.698.900,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan persentase Kinerja 0% dan untuk realisasi Keuangan 0%.

- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan target 1 Laporan dan akan terealisasi pada triwulan iv, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 81.675.093,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 39.064.089,- dengan persentase Kinerja 0% dan untuk realisasi Keuangan 47,83%.

c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator pada subkegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara dengan target 48 unit dan sudah terealisasi sebanyak 10 unit pada triwulan ii ini, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 17,700,000,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 39.064,089,- dengan persentase Kinerja 0% dan untuk realisasi Keuangan 47,83%.

2. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI

a. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi

Indikator pada subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab/Kota dengan target 1 Dokumen dan akan terealisasi pada triwulan iv. untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 130.760.700,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 43.542.841,- dengan persentase Kinerja 0% dan untuk realisasi Keuangan 33,30%.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota

Indikator pada subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab/Kota dengan target 1 Dokumen dan akan terealisasi pada triwulan iv, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 232.236.139,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 40.148.758,- dengan persentase Kinerja 0% dan untuk realisasi Keuangan 17,29%.

- Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan

Indikator pada subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan dengan target 1 Dokumen dan akan terealisasi pada triwulan iv, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 167.178,200,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 36.491.100,- dengan persentase Kinerja 0% dan untuk realisasi Keuangan 21,83%

b. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

- Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Indikator pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan target 1 Dokumen dan akan terealisasi pada triwulan iii, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 213.771.600,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 104.180.451,- dengan persentase Kinerja 0% dan untuk realisasi Keuangan 48,73%.

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Indikator pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target 1 Dokumen dan akan terealisasi pada triwulan iii, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 193.811.800,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 89.377.805,- dengan persentase Kinerja 0% dan untuk realisasi Keuangan 46,12%.

- Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja

Indikator pada sub kegiatan ini adalah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja dengan target 1 Laporan dan akan terealisasi pada triwulan iii, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 90.416.800,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 5.626.000,- dengan persentase Kinerja 0% dan untuk realisasi Keuangan 6,22%.

- Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan

Indikator pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan dengan target 1 Dokumen dan akan terealisasi pada triwulan iv, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 179.260.251,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 34.761.757,- dengan persentase Kinerja 0% dan untuk realisasi Keuangan 19,39%.

- Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Indikator pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik dengan target 1 Dokumen dan akan terealisasi pada triwulan iv, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 443,546,083,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 79.997.696,- dengan persentase Kinerja 0% dan untuk realisasi Keuangan 18,04%.

B. Program/Kegiatan/Subkegiatan yang sudah memenuhi target yang ditetapkan sampai pada Triwulan II Tahun 2024.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dengan target 2 dokumen dan telah terealisasi sebanyak 2 dokumen, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 4.279.500,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 4.279.200,- dengan persentase Kinerja 100% dan untuk realisasi Keuangan 99,99%.

- Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dengan target 1 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 3 laporan, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 1.017.000,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 1.017.000,- dengan persentase Kinerja 100% dan untuk realisasi Keuangan 100%.

- Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 1 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 1 laporan, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar

Rp. 828.000,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 828.000,- dengan persentase Kinerja 100% dan untuk realisasi Keuangan 100%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Subkegiatan Pelaksanan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target 1 dokumen dan telah terealisasi 1 dokumen, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 93.360.000,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 46.680.000,- dengan persentase Kinerja 100% dan untuk realisasi Keuangan 50%.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target 1 dokumen dan sudah terealisasi 1 dokumen, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 7.860.216,- dengan persentase Kinerja 100% dan untuk realisasi Keuangan 98,25%.

- Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target 1 Laporan dan sudah terealisasi 1 laporan, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 3.143.000,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 7.860.216,- dengan persentase Kinerja 100% dan untuk realisasi Keuangan 0%.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator dari subkegiatan ini adalah Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target 3 orang dan telah terealisasi 3 orang, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan yang sudah

teralisasi sebesar Rp. 1.600.0000,- dengan persentase Kinerja 100% dan untuk realisasi Keuangan 32%.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan target 5 Paket dan telah terealisasi 5 Paket, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 76.044.300,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 54.900.000,- dengan persentase Kinerja 100% dan untuk realisasi Keuangan 72,19%.

- Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan dengan target 10 Paket dan telah terealisasi 10 Paket, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 88.330.000,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 74.110.000,- dengan persentase Kinerja 100% dan untuk realisasi Keuangan 83,90%.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator dari subkegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipeliharadan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan target 4 unit dan terealisasi 4 unit, untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 62.290.000,- dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 14.328.000,- dengan persentase Kinerja 100% dan untuk realisasi Keuangan 23,00%.

Berdasarkan kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan

Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil terhadap hal tersebut di atas adalah:

1. Optimalisasi menjaga konsistensi target-target kinerja perencanaan dan penganggaran.
2. Melakukan penyesuaian/perubahan terhadap indikator dan target kinerja serta kerangka pendanaan Renja terutama terhadap target kinerja sub kegiatan yang belum terpenuhi namun alokasi anggarannya masih tersedia maupun penambahan alokasi anggaran pada target kinerja yang belum terlampaui melalui mekanisme pergeseran antar program/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja Biro Organisasi Tahun 2024 disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2024. Penyusunan perubahan rencana kerja ini dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran serta hal-hal dari berbagai faktor yang akan dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran strategis tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan atau merencanakan program dan kegiatan tahun 2024 disesuaikan/diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelancaran administrasi perkantoran dilingkungan Biro. Untuk kelancaran proses administrasi perkantoran diperlukan adanya program dan kegiatan yang menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Biro.
2. Pencapaian misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu khusus kepada misi 7 dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, Akuntabel serta berkualitas dengan Program dan kegiatan yang dirumuskan untuk menunjang pencapaian misi tersebut dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas serta pelayanan publik.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan untuk suatu periode sebagai suatu ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode terbatas (sampai dengan lima tahun). Tujuan akan menentukan bagian-bagian tujuan yang lebih pendek atau sasaran yang akan diwujudkan sebagai indikator dapat tidaknya suatu tujuan terwujud. Tujuan merupakan target kualitatif

organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.

**Tabel 3.1. Perbandingan Rencana Kinerja
Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Setelah Perubahan
1.	Meningkatnya kualitas Kelembagaan	Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100
			Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat Fungsi dan tepat ukuran	100	100
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki Nilai SAKIP A	12	12
3.		Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda	12,9	12,9
4.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan	Hasil Penilaian Mandiri Area Manajemen Perubahan	1,89	-
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	-	93

5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik lolos saringan kompetisi secara Nasional	11	-
		Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas	Persentase Keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik	-	100
6.		Penataan tatalaksana yang efektif	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan	18	30
7.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (83)	A (81)
8.		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	88 (Baik)	91 (Amat Baik)

Pada tabel di atas, terlihat beberapa sasaran dan indikator mengalami perubahan. Perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pada sasaran nomor 4 dan 5, penyebab perubahan terjadi dikarenakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak lagi melakukan penilaian pada area manajemen perubahan, Menapn RB juga meniadakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional (Sinovik) pada tahun ini sehingga dilakukan perubahan pada sasaran dan indikator tersebut.
2. Pada Sasaran 6 dan 8 dilakukan perubahan target dikarenakan sesuai hasil evaluasi dimana realisasi yang telah di capai tahun sebelumnya melebihi target yang ditetapkan di awal.

3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Kerangka kerja dan pendanaan pada Rancangan Perubahan Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan kerangka kerja Pembangunan Daerah (RKPD-P) Tahun 2024 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.

Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 tercantum sebagaimana pada tabel berikut:

TABEL 3.2
REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPd BIRO ORGANISASI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA BARAT

NAMA OPD : BIRO ORGANISASI

No.	RANCANGAN PERUBAHAN RKPd TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	1.456.354.827	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	1.349.018.427
4.01.01.1.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	6.124.500	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	6.124.500
4.01.01.1.01.01	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	4.279.500	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	4.279.500
4.01.01.1.01.06	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.017.000	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.017.000
4.01.01.1.01.07	c Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	828.000	c Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	828.000
4.01.01.1.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	93.360.000	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	93.360.000
4.01.01.1.02.03	a Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	93.360.000	a Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	93.360.000
4.01.01.1.03	3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	11.143.000	3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	11.143.000
4.01.01.1.03.02	a Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.000.000	a Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.000.000
4.01.01.1.03.06	b Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.143.000	b Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.143.000
4.01.01.1.05	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	12.500.000	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	5.000.000
4.01.01.1.05.09	a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Orang	12.500.000	a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Orang	5.000.000
4.01.01.1.06	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.063.825.032	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	966.768.600
4.01.01.1.06.02	a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	76.044.300	a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	76.044.300
4.01.01.1.06.03	b Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	10 Paket	88.330.000	b Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	10 Paket	88.330.000
4.01.01.1.06.04	c Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	45.948.300	c Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	45.948.300

No.	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp.)		
4.01.01.1.06.05	d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	31.170.000	d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	31.170.000
4.01.01.1.06.06	e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	822.332.432	e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	725.276.000
4.01.01.1.07	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	104.957.234	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Provinsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	104.957.234
4.01.01.1.07.05	a	Pengadaan Mebel	Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	18 Paket	86.258.334	a	Pengadaan Mebel	Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	18 Paket	86.258.334
4.01.01.1.07.06	b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	18.698.900	b	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	18.698.900
4.01.01.1.08	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	84.455.061	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	81.675.093
4.01.01.1.08.04	a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	84.455.061	a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	81.675.093
4.01.01.1.09	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100%	79.990.000	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100%	79.990.000
4.01.01.1.09.01	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	62.290.000	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	62.290.000
4.01.01.1.09.06	b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	48 Unit	17.700.000	b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	48 Unit	17.700.000
II	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Provinsi	Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	12 Perangkat Daerah	1.393.645.173	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Provinsi	Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	12 Perangkat Daerah	1.650.981.573
			Provinsi	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik	11 Perangkat Daerah		Provinsi	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik	0%			
			Provinsi	Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	18 Perangkat Daerah		Provinsi	Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	30 Perangkat Daerah			
			Kab/Kota	Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran	100%		Kab/Kota	Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran	100%			
			Provinsi	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%		Provinsi	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%			
			Provinsi	Penataan Jabatan Perangkat Daerah	100%		Provinsi	Penataan Jabatan Perangkat Daerah	100%			
4.01.02.1.01	9	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab/Kota	Persentase Kabupaten / Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	442.845.039	9	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab/Kota	Persentase Kabupaten / Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	530.175.039
			Provinsi	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%				Provinsi	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	
4.01.02.1.01.01	a	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab/Kota	1 Dokumen	121.985.700	a	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab/Kota	1 Dokumen	130.760.700
4.01.02.1.01.02	b	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab/Kota	1 Dokumen	174.856.139	b	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab/Kota	1 Dokumen	232.236.139

No.	RANCANGAN PERUBAHAN RKPd TAHUN 2024						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
4.01.02.1.01.03	c	Penataan Analisis Jabatan	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	146.003.200	c	Penataan Analisis Jabatan	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	167.178.200
4.01.02.1.02	10	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Provinsi	Nilai Komponen Pemenuhan untuk 4 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (Area Manajemen Perubahan, Penguatan Akuntabilitas, Penataan Tatalaksana, dan Pelayanan Publik)	5 Skor	950.800.134	10	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Provinsi	Nilai Komponen pemenuhan untuk 4 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (Area Manajemen Perubahan, Penguatan Akuntabilitas, Penataan Tatalaksana, Pelayanan Publik)	5 Skor	1.120.806.534
4.01.02.1.02.01	a	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	155.265.500	a	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	213.771.600
4.01.02.1.02.02	b	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	180.821.500	b	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	193.811.800
4.01.02.1.02.03	c	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Provinsi	Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	84.416.800	c	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Provinsi	Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	90.416.800
4.01.02.1.02.04	d	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	1 Dokumen	129.625.251	d	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	1 Dokumen	179.260.251
4.01.02.1.02.05	e	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	400.671.083	e	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	443.546.083

3.3 Kerangka Kerja dan Pendanaan pada Rancangan Perubahan Renja

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2024 serta berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan sampai dengan kondisi Triwulan II Tahun 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan sebagaimana diilustrasikan pada tabel berikut:

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BIRO ORGANISASI PROVINSI SUMATERA BARAT
BERDASARKAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN					INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		PAGU ANGGARAN AWAL (Rp.)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/B ERKURANG (Rp.)	Ket	
						INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH														
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	1.349.018.427	1.456.354.827	107.336.400	
4	01	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja	100%	6.124.500	6.124.500	0	
4	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	4.279.500	4.279.500	0	
4	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.017.000	1.017.000	0	
4	01	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	828.000	828.000	0	
4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	93.360.000	93.360.000	0	
4	01	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	93.360.000	93.360.000	0	
4	01	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	11.143.000	11.143.000	0	
4	01	01	1	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.000.000	8.000.000	0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN					INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		PAGU ANGGARAN AWAL (Rp.)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/B ERKURANG (Rp.)	Ket	
						INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR					
4	01	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.143.000	3.143.000	0	
4	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	5.000.000	12.500.000	7.500.000	
4	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Orang	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Orang	5.000.000	12.500.000	7.500.000	
4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	966.768.600	1.063.825.032	97.056.432	
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	76.044.300	76.044.300		
4	01	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	10 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	10 Paket	88.330.000	88.330.000		
4	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	45.948.300	45.948.300	0	
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	31.170.000	31.170.000	0	
4	01	01	1	06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	725.276.000	822.332.432	97.056.432	
4	01	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	104.957.234	104.957.234	0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN						INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		PAGU ANGGARAN AWAL (Rp.)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/B ERKURANG (Rp.)	Ket
							INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR				
4	01	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	18 Paket	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	18 Paket	86.258.334	86.258.334	0	
4	01	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	18.698.900	18.698.900	0	
4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	81.675.093	84.455.061	2.779.968	
4	01	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	81.675.093	84.455.061	2.779.968	
4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	79.990.000	79.990.000	0	
4	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	62.290.000	62.290.000	62.290.000	
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	48 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	48 Unit	17.700.000	17.700.000	17.700.000	
4	01	02				PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	12 Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	12 Perangkat Daerah	1.650.981.573	1.393.645.173	-257.336.400	
							Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik	11 Perangkat Daerah	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi	11 Perangkat Daerah				
							Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	18 Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis	18 Perangkat Daerah				
							Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran	100%				
							Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN						INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		PAGU ANGGARAN AWAL (Rp.)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/B ERKURANG (Rp.)	Ket
							INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR				
							Penataan Jabatan Perangkat Daerah	100%	Penataan Jabatan Perangkat Daerah	100%				
4	01	02	1	01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Kabupaten / Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	Persentase Kabupaten / Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	530.175.039	442.845.039	-87.330.000	
							Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%				
4	01	02	1	01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab/Kota	1 Dokumen	130.760.700	121.985.700	-8.775.000	
4	01	02	1	01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kab/Kota	1 Dokumen	232.236.139	174.856.139	-57.380.000	
4	01	02	1	01	03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	167.178.200	146.003.200	-21.175.000	
4	01	02	1	02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Kompenen Pemenuhan untuk 4 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (Area Manajemen Perubahan, Penguataan Akuntabilitas, Penataan Tatalaksana, dan Pelayanan Publik)	5 Skor	Nilai Kompenen Pemenuhan untuk 4 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (Area Manajemen Perubahan, Penguataan Akuntabilitas, Penataan Tatalaksana, dan Pelayanan Publik)	5 skor	1.120.806.534	950.800.134	-170.006.400	
4	01	02	1	02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	213.771.600	155.265.500	-58.506.100	
4	01	02	1	02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	193.811.800	180.821.500	-12.990.300	
4	01	02	1	02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	90.416.800	84.416.800	-6.000.000	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		PAGU ANGGARAN AWAL (Rp.)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/B ERKURANG (Rp.)	Ket	
						INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR					
4	01	02	1	02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemeirntahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	1 Dokumen	179.260.251	129.625.251	-49.635.000	
4	01	02	1	02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	443.546.083	400.671.083	-42.875.000	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat ada sejumlah pengurangan dan penambahan alokasi anggaran pada masing-masing sub kegiatan antara kondisi awal RKPD dan rencana pada perubahan RKPD. secara umum terjadi pengurangan anggaran sebanyak Rp. 150.000.000,- dari anggaran awal sebanyak Rp. 3.000.000.000,- menjadi Rp. 2.850.000.000,-.

B A B IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2024 disusun untuk mencapai target indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2024. Penyusunan perubahan rencana kerja ini dilakukan dengan lebih cermat, memperhatikan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta kemampuan sumber daya yang tersedia. Berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran strategis juga dipertimbangkan dengan seksama.

Dengan demikian, Perubahan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini diajukan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Padang, Agustus 2024

KEPALA BIRO ORGANISASI



FITRIATI.M,S.Si,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730513 199703 2 005